

REFLEKSI DAN TRANSFORMASI

Memberdayakan Masyarakat dan Memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia



YAPPIKA-ActionAid Annual Report 2023

All rights reserved.

You may copy, distribute, and send this work for non-commercial purposes.

To request a copy of this publication or for further details, please contact

YAPPIKA-ActionAid.

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI, INISIATIF, DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA (YAPPIKA-ActionAid)

Kompleks Ruko YAMAHA, Jl. Jend. Basuki Rachmat No.7, RT. 6/RW. 10

Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410

Telepon : (021) 21018030

E-mail : office@yappika-actionaid.or.id

Website: www.yappika-actionaid.or.id





DAFTAR ISI

02	Pengantar Direktur YAPPIKA ActionAid Refleksi dan Transformasi: Memberdayakan Masyarakat dan Memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia
03	Country Strategy Paper, Lima Tahun Kemudian
11	Prioritas Program 1
21	Prioritas Program 2
25	Prioritas Program 3
29	Prioritas Program 4
33	Laporan Keuangan
37	Prioritas-prioritas Organisasi

Pengantar Direktur YAPPIKA-ActionAid

REFLEKSI DAN TRANSFORMASI: MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DAN MENGUATKAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA

Lima tahun terakhir adalah setengah periode perjalanan Country Strategy Paper (CSP) YAPPIKA-ActionAid, menjadi periode yang penuh dinamika bagi YAPPIKA-ActionAid. Dalam lanskap sosial dan politik Indonesia yang terus berubah, kami berkomitmen untuk terus hadir di garis depan dalam memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia. Melalui berbagai program dan inisiatif, YAPPIKA-ActionAid berupaya untuk memberdayakan masyarakat dan menguatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) di seluruh penjuru Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama kami, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses terhadap hak-hak dasar, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Kami melakukan hal ini melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, pendampingan kelompok masyarakat, dan advokasi kebijakan publik.

Penguatan OMS juga menjadi pilar penting dalam kerja-kerja kami. OMS merupakan mitra strategis dalam mewujudkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan kapasitas OMS, baik dari sisi kelembagaan maupun program. Kegiatan yang kami lakukan antara lain pendampingan organisasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi jaringan kerja OMS.

Kedua peran ini saling melengkapi dan saling menguatkan. Pemberdayaan masyarakat tidak akan optimal tanpa adanya OMS yang kuat sebagai fasilitator dan advokat. Sebaliknya,



Fransisca Fitri
Executive Director

OMS membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat menjalankan program-programnya secara efektif. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan OMS merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pemberdayaan masyarakat tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari organisasi masyarakat sipil. OMS berperan sebagai mitra strategis dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan OMS berjalan seiringan.

Selama periode 2019-2023, YAPPIKA-ActionAid telah mencapai banyak kemajuan. Namun, kami juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Melalui proses refleksi yang mendalam, kami berkomitmen untuk terus belajar dan beradaptasi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

Perjalanan YAPPIKA-ActionAid dalam memberdayakan masyarakat dan menguatkan organisasi masyarakat sipil di Indonesia adalah sebuah proses yang panjang dan terus berkembang. Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang kuat dan komitmen yang tinggi, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.



**MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DEMI
KEADILAN SOSIAL DAN DEMOKRASI
YANG MENGAJAR**



COUNTRY STRATEGY PAPER, LIMA TAHUN KEMUDIAN

Pada tahun 2023 ini *Country Strategy Paper* YAPPIKA 2019-2028 tepat berusia 5 tahun, atau separuh perjalanan yang akan berakhir pada 2029. *Country Strategy Paper* (CSP) adalah dokumen utama YAPPIKA yang diturunkan menjadi empat prioritas program untuk durasi yang sama. Sebagai dokumen yang hidup (*living document*) berdurasi cukup panjang (10 tahun), CSP dapat ditinjau ulang, diubah dan diperbaiki untuk menjaga relevansinya dalam konteks yang berubah. Pada tahun 2024, YAPPIKA meninjau ulang CSP ini, terutama formulasi capaian-capaian yang diharapkan (*expected result*) beserta indikator-indikatornya. Perubahan yang terjadi adalah cara adaptasi YAPPIKA terhadap lingkungan dan

konteks yang berubah setelah setengah periode CSP 2019-2028. Hasilnya akan dapat dilihat pada program-program YAPPIKA di tahun-tahun yang akan datang.

Senyampang CSP 2019-2028 telah menempuh separuh perjalanan, **Laporan Tahunan YAPPIKA 2023** ini disusun membantu kami melakukan retrospeksi dari perjalanan paruh pertama, menarik pelajaran dari implementasi empat prioritas program yang mencakup; PP1, PP2, PP3, PP4. Laporan ini juga memaparkan pengelolaan organisasi YAPPIKA untuk menunjukkan bagaimana organisasi ini tumbuh sebagai *learning organization*.

❖ Prioritas-prioritas Program YAPPIKA 2019-2028

Pada saat CSP 2019-2028 disusun, Presiden Joko Widodo tengah bersiap mengawali tahun pertama periode kedua pemerintahannya dengan sejumlah tantangan pembangunan. Meskipun tingkat kepuasan (*approval rate*) terhadap Presiden Joko Widodo cukup tinggi (72 persen), YAPPIKA menemukan Indonesia masih menghadapi persoalan klasik, yang ditangani dengan gagap oleh pemerintah. Salah satunya adalah ketidaksetaraan gender, yang sebagian masalahnya justru memiliki akar struktural. Meskipun lembaga-lembaganya sudah terpapar gagasan kesetaraan gender, Pemerintah di tingkat nasional maupun subnasional belum berhasil menyelesaikan problem ketidaksetaraan secara mendasar.

Patriarki masih menjadi arus utama pemikiran yang menghambat kesetaraan gender di pemerintahan maupun keluarga. Dalam struktur keluarga yang patriarkis, perempuan dan kaum muda, tidak cukup berdaya. Mereka kerap dikucilkan dari pengambilan keputusan, penggunaan anggaran keluarga, dan pilihan kesehatan. Bersamaan dengan itu, pandangan

keagamaan yang konservatif dan norma-norma adat membawa dampak merugikan pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik perempuan. Di sisi lain, perempuan masih menghadapi hambatan-hambatan partisipasi dalam pembuatan keputusan sektor publik, terutama perencanaan pembangunan dan penganggaran. Di tingkat desa, perempuan dan anak belum mendapatkan haknya untuk terlibat secara bermakna (*meaningful participation*) dalam pembuatan keputusan publik.





Sementara pengucilan perempuan dari kebijakan publik maupun domestik masih terjadi, status kesejahteraan perempuan tidak menggembirakan. Pada tahun 2016, data Survey Penduduk antar Sensus yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kematian ibu (*maternal mortality rate*) pada tahun 2016 adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup. Itu bukan statistik yang menggembirakan jika dibandingkan dengan catatan negara tetangga. Kantor Statistik Malaysia mencatat tingkat kematian ibu hanya 29.1, dan Singapura hanya 7 per 100,000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Pernikahan dan kehamilan usia muda menjadi salah satu penyebab kematian ibu dan beragam komplikasi kesehatan. Selanjutnya, laporan Riset Kesehatan Dasar Kemenkes Tahun 2018 mencatat 30,8 persen bayi berusia di bawah lima tahun (balita) tidak tumbuh dengan sehat (*stunting*). Angka itu lebih buruk dibanding Malaysia yang mencatat 20,7 persen pada 2016. Pada saat yang sama, *United Nation's Statistics Division on the World's Women* (2015) melaporkan kaum perempuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk kerja di sektor domestik yang tidak dibayar, dibanding kaum laki-laki di negara yang sedang berkembang, dengan akses yang terbatas pada pembuatan keputusan dan kegiatan ekonomi.

Dalam keluarga dengan struktur patriarkis, perempuan dan anak-anak dibuat tidak berdaya (*disempowered*), dikecualikan dari pembuatan keputusan mengenai pendidikan, belanja keluarga, dan pilihan layanan kesehatan. Di ruang publik, struktur pemerintahan desa tidak mau melibatkan anggota masyarakat, khususnya perempuan, dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran.

Didorong oleh mandat organisasi untuk mendukung penguatan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional maupun sub-nasional, YAPPIKA terpenggil untuk menanggapi situasi di atas secara programatik. YAPPIKA meyakini layanan publik berkualitas yang diselenggarakan secara adil tanpa diskriminasi berbasis gender adalah kunci bagi pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang sehat dan berfungsi dengan baik. Pada dasarnya, mandat klasik YAPPIKA mengenai pengembangan kapasitas masyarakat sipil itu menjadi landasan penyusunan **Program Prioritas 1. Layanan Publik yang Inklusif dan Responsif Gender (*Gender Responsive and Inclusive Public Service, GRIPS*)**.



Selain masalah di atas, YAPPIKA juga mengenali pelbagai situasi yang tidak menguntungkan bagi warga negara dan organisasi masyarakat sipil, terutama yang bersikap kritis terhadap peminggiran kelompok-kelompok marjinal sehingga mereka terjebak dalam situasi itu secara terus-menerus. Kelompok-kelompok kritis itu kerap menghadapi tekanan, intimidasi, dan ancaman dari negara. Mereka diawasi karena menentang *status quo*, dikontrol ketat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). UU tersebut menjadi instrumen yang membatasi organisasi masyarakat sipil terhadap sumberdaya dan legalitas operasinya.

Pembatasan terhadap organisasi masyarakat sipil dapat menjadi rujukan dalam menilai kualitas demokrasi di sebuah negara. Pada 2018, menurut catatan BPS, indeks demokrasi Indonesia hanya 72,39 atau kategori “sedang”. Selain BPS, organisasi pemantau seperti CIVICUS memberi skor yang kurang lebih sama. Pada tahun yang sama, dari lima kategori status demokrasi yang digunakan CIVICUS, Indonesia tepat ada di tengah, yakni ‘obstructed’ atau terhambat. Selama bertahun-tahun sejak runtuhnya Orde Baru pada 1998, status demokrasi Indonesia tidak pernah jauh berkisar dari posisi itu.

Status demokrasi Indonesia yang tidak kunjung maju selama bertahun-tahun itu menjadi perhatian banyak organisasi masyarakat sipil Indonesia. Bagi YAPPIKA, situasi ini membentangkan tantangan nyata, yang menghambat pemenuhan progresif hak azasi manusia (HAM) yang setinggi-tingginya. Dalam pandangan YAPPIKA, organisasi masyarakat sipil perlu menempuh beberapa cara untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia berdasar kerangka kerja proses dan kelembagaan demokrasi.

Secara teoritik, kualitas demokrasi ditentukan oleh antara lain oleh warga negara yang terlibat secara aktif dalam proses politik. *Active citizenship* bermakna keterlibatan warga negara dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi di masyarakat dan negara. Partisipasi aktif warga ini melampaui keterlibatan dalam mekanisme formal melalui lembaga-lembaga demokrasi, mencakup pula keterlibatan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Bagi YAPPIKA, *active citizenship* akan membawa perubahan yang berarti jika dilandasi oleh kapasitas masyarakat sipil yang baik untuk terlibat mewujudkan kebajikan publik (*public virtue*). Defisit kapasitas masyarakat sipil akan menurunkan kualitas partisipasi, dan menghambat kedalaman dampak dari partisipasinya. Oleh karena itu, kapasitas masyarakat sipil yang terus meningkat dapat diandaikan berbanding lurus dengan kedalaman *active citizenship*, sekaligus kebajikan publik yang menjadi muaranya.

Sampai titik ini, YAPPIKA melihat kapasitas masyarakat sipil adalah pijakan untuk mencapai dua tujuan. Selain *active citizenship*, kapasitas organisasi masyarakat sipil harus didedikasikan juga untuk menciptakan atau mempertahankan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) pertumbuhan masyarakat sipil secara berkelanjutan. Organisasi masyarakat sipil bertanggungjawab menjaga lingkungan atau mempertahankan ruang sipil dari tekanan dan kemerosotan.

Dua tataran perubahan itu yang melahirkan **Program Prioritas 2. Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organization Capacity Strengthening, CSOCS*) dan Prioritas Program 3. Advokasi Ruang Sipil (*Civic Space Advocacy*).**

Sama nilainya dengan dengan *awareness* terhadap konteks sosial dan politik, YAPPIKA menyadari bahwa Indonesia ada dalam posisi alamiah yang berisiko. Berdasarkan data UNISDR, sebuah Badan PBB untuk Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko

Bencana, Indonesia menyimpan pelbagai risiko bencana alam; gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor, serta bencana akibat perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan yang tepat ada di atas *Pacific Ring of Fire*, Indonesia menduduki ada di peringkat teratas dari 265 yang menghadapi risiko tsunami, berdekatan dengan Jepang.

Dengan karakteristik alam yang rawan bencana, upaya tanggap darurat dan mitigasi risiko bencana alam menjadi suatu keniscayaan bagi Indonesia. Sementara alam adalah elemen yang tidak mudah dimanipulasi dalam mitigasi risiko, menyiapkan masyarakat dengan kapasitas yang baik untuk menghadapi ancaman bencana alam adalah pilihan yang sebanding dengan kapasitas organisasi YAPPIKA. Selain itu, bekerja dengan komunitas membangun ketangguhan dan mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah juga mandat organisasi, sejak YAPPIKA menjadi bagian dari Federasi ActionAid. Dengan pijakan mandat itu, bekerja di sektor kemanusiaan dan kesiagaan bencana menjadi tema **Program Prioritas 4. Kemanusiaan dan Resiliensi (*Humanitarian and Resilience*).**



◆ Prioritas-prioritas Organisasi

Selain retrospeksi secara tematis, Laporan Tahunan YAPPIKA 2023 ini akan memaparkan pertumbuhan organisasi dan merekam pelajaran-pelajaran penting sepanjang periode 2019-2023.

Sebagai *learning organization*, YAPPIKA selalu berupaya memahami perubahan dan perkembangan pada konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Salah satu yang penting adalah munculnya bentuk-bentuk baru gerakan sosial, yang didorong oleh teknologi komunikasi dan media sosial. Bersamaan dengan itu, dari demografi Indonesia yang berstruktur piramidal muncul lapisan baru kelas menengah ekonomi yang cukup mapan, dengan kepedulian terhadap masyarakat miskin. Kaum muda yang sebagian besar menghuni kawasan urban itu terdidik dengan baik, kreatif dan aktif di dunia digital. Mereka memiliki dorongan yang cukup untuk mengutarakan pikiran dan menunjukkan sikap terhadap kesenjangan dan ketidakadilan yang ada di masyarakat.

Mereka juga memiliki *compassion* untuk berbagi. Mereka adalah lapisan masyarakat yang dengan sumberdaya yang dapat digerakkan *for good causes*. Sebagian mereka adalah pendukung pembiayaan program YAPPIKA. Selain mereka, YAPPIKA juga menemukan potensi di sektor korporasi yang menunggu upaya masyarakat sipil untuk memanfaatkannya. Pemanfaatan itu dilandasi kehati-hatian untuk mencegahnya menjadi kerjasama yang oportunistik, dan menghindarkan YAPPIKA dari konflik nilai, standar ganda, dan pelanggaran mandat organisasi, khususnya promosi HAM dan keadilan sosial.

Untuk mewadahi upaya merespon dan beradaptasi terhadap dinamika di atas, YAPPIKA memiliki tiga prioritas organisasi, sebagai berikut:

Prioritas Organisasi 1. Penggalangan Sumber Daya Berkelanjutan

mencerminkan cara YAPPIKA menyesuaikan diri dalam lingkungan yang berubah itu. Lebih dari itu, adaptasi ini juga upaya YAPPIKA menjadikan program-program organisasi bagian dari upaya khalayak luas menuju kebajikan publik. Bagi YAPPIKA yang mengelola dan terus berusaha memenangkan kepercayaan masyarakat, prioritas ini menegaskan cara menegakkan gagasan akuntabilitas yang lebih kokoh antara OMS dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*); di dalamnya ada donatur individu, keanggotaan federasi internasional, dan donor institusi.

Prioritas Organisasi 2. Pengembangan

Pengetahuan dan Pembelajaran. Di bawah prioritas ini, YAPPIKA mendorong dirinya sendiri sebagai *learning organization* untuk bekerja lebih baik dari waktu ke waktu. Bagi YAPPIKA, pengukuran kinerja menunjukkan seberapa cepat organisasi belajar, membantu meletakkan persoalan internal dalam perspektif yang tepat, dan memberi arah adaptasi organisasi dalam lingkungan dan tantangan yang terus berubah.

Prioritas Organisasi 3. Penguatan Tata Kelola

Menuju Anggota Affiliate AAI menjelaskan upaya YAPPIKA memperkuat tata kelola organisasi dan menguatkan akuntabilitas dan kredibilitas kepada donatur dan publik.



Bagaimana YAPPIKA Bekerja

Untuk menggapai cita-cita besar di atas, YAPPIKA berpegang pada prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM). Pendekatan berbasis HAM (*human rights-based approach, HRBA*) ini memiliki empat pilar; pemberdayaan, solidaritas, kampanye, dan alternatif. HRBA, memandu YAPPIKA untuk menempatkan kelompok-kelompok marjinal sebagai pusat dari upaya pemenuhan HAM, baik pada tingkat kesadaran terhadap hak, pengorganisasian maupun advokasi untuk pemenuhan dan promosi HAM. HRBA mendorong masyarakat aktif mengenali masalah, merumuskan tindakan, dan menuntut akuntabilitas negara dalam pemenuhan HAM. Dengan pemberdayaan, masyarakat dapat memahami dan menuntut sekaligus terlibat dalam pemenuhan hak-hak mereka tanpa pembedaan berdasar ras, suku, gender, keyakinan, atau ciri-ciri lainnya. Dengan HRBA, YAPPIKA mengutamakan mekanisme pemenuhan HAM tanpa merusak lingkungan, dan menjamin masa depan yang baik bagi generasi yang akan datang.

YAPPIKA tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memfasilitasi proses belajar dan berorganisasi

bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat menjadi agen perubahan dalam kehidupan mereka sendiri. Pada sisi lain, YAPPIKA secara aktif terlibat dalam advokasi kebijakan untuk memastikan pemerintah memenuhi hak-hak asasi manusia. YAPPIKA juga bermitra dengan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat gerakan sosial dan memperluas jangkauan program.

Dengan demikian, pendekatan berbasis HAM atau HRBA adalah jantung dari semua program YAPPIKA. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek hak, YAPPIKA tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendekatan ini tidak hanya efektif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai universal tentang keadilan dan martabat manusia. Sesuai rumusan visi dan misi organisasi, YAPPIKA mendukung pemenuhan hak-hak rakyat dan *active citizenship*, melalui promosi hak-hak rakyat, mendorong pelayanan publik berkualitas yang inklusif dan responsif gender, pengorganisasian rakyat, dan penguatan peran organisasi masyarakat sipil.



Dukungan Masyarakat dan Transformasi YAPPIKA

Dukungan masyarakat terhadap YAPPIKA terus menguat. Catatan kami menunjukkan dana masyarakat yang dipercayakan kepada organisasi ini cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Kenaikan itu memperkuat dorongan bagi organisasi ini untuk lebih terbuka dan transparan. YAPPIKA mengerti, mekanika akuntabilitas meletakkan kewajiban untuk menjadi akuntabel pada organisasi ini, sebagai jawaban terhadap kepercayaan masyarakat itu. Oleh karena itu, YAPPIKA menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai rambu-tambu yang menjaga organisasi ini tetap berpegang pada mandatnya dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat sipil. YAPPIKA juga membiasakan diri untuk bekerja di bawah pengawasan publik, sebagai mekanisme natural menjaga standar tata kelola organisasi yang baik.

Dana masyarakat itu memungkinkan YAPPIKA mendorong pemenuhan hak-hak dasar (*basic rights*) warga negara melampaui batas kedermawanan (*charity*) konvensional. Selain hasil yang nyata (*perceptible*) dan berwujud (*tangible*), program layanan publik yang inklusif dalam rumpun PP1 yang didukung dana masyarakat memungkinkan para penerima manfaat mengembangkan kapasitas untuk menjadi komunitas yang terorganisir dan

berdaya (*empowered*). Keberdayaan itu adalah landasan mereka menjalankan dalam aktivitas kewargaan (*active citizenship*) dan terlibat (*engage*) secara kritis dengan negara dan pemerintah di tingkat daerah.

Dukungan publik juga memberi YAPPIKA pijakan untuk berdiri sama tinggi dengan pemerintah. Pada beberapa kasus, program advokasi layanan publik menghadapi tantangan kelangkaan dana dan prioritas pembangunan pemerintah yang menepikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dalam situasi itu, YAPPIKA dan komunitas penerima manfaat mampu menunjukkan model alternatif pembiayaan sekaligus tatalaksana pembangunan infrastruktur layanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Itulah wilayah-wilayah baru yang dirambah oleh YAPPIKA berkat pembiayaan fleksibel yang berasal dari dana masyarakat. Model pembiayaan bersumber dana masyarakat ini memungkinkan program dirancang secara *tailor-made*, untuk konteks yang berbeda-beda antar lokasi. Selain itu, fleksibilitas pembiayaan dengan dana masyarakat juga memungkinkan program menyesuaikan cara, pendekatan, dan strategi implementasinya, terhadap konteks yang berubah.





**GENDER RESPONSIVE &
INCLUSIVE PUBLIC SERVICE**



LAYANAN PUBLIK YANG INKLUSIF DAN RESPONSIF GENDER (*GENDER RESPONSIVE AND INCLUSIVE PUBLIC SERVICE, GRIPS*)

Dari CSP 2019-2028, YAPPIKA mengembangkan Prioritas Program 1 (PP 1) menjadi 4 program yang secara simultan menjawab tantangan di sektor layanan publik yang inklusif dan sensitif gender. Secara garis besar, PP 1 memiliki 4 indikator utama sebagai berikut:

- Membangun percontohan sekolah inklusif di mana kelompok guru dan komite sekolah aktif menyelesaikan isu-isu pendidikan di sekolah mereka;
- Membangun sistem deteksi dini *stunting* yang melibatkan warga dan pemerintah;
- Terciptanya pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan yang mengakomodasi kelompok rentan; dan
- Meningkatnya partisipasi aktif kelompok perempuan dan kepemimpinan perempuan di lokasi kerja YAPPIKA dalam advokasi penyediaan layanan dasar. Hingga saat ini Program Sekolah Aman dan Desa Sehat merupakan tulang punggung bagi Program Prioritas 1 dalam mencapai target-target yang ditetapkan di dalam CSP 2019-2028

Sepanjang 2023, YAPPIKA, menjalankan dua program *flagship* sebagai terjemahan dari PP 1 di atas. Program *pertama* adalah Program Sekolah Aman (PSA), yang sudah kami jalankan sejak 2016. Sedangkan program *kedua* adalah Program Desa Sehat (PDS) sejak 2019. Dua program utama itu berjalan berkat pembiayaan dari *individual donor*, para pendukung yang mempercayakan bantuannya kepada organisasi ini. Dua program itu menunjukkan cara YAPPIKA menggerakkan *civic activism*, sumber daya, *compassion*, dan dukungan warga negara untuk membantu sesama warga negara lain.

Dari bagian ini pembaca akan mengetahui bagaimana YAPPIKA menerjemahkan PP 1 dalam pelaksanaan program dengan pendekatan berbasis hak-hak asasi manusia (*human rights-based approach*). Lebih dari sekadar melaporkan pencapaian dan kinerja program, YAPPIKA ingin berbagi cerita dengan pembaca mengenai bagaimana organisasi ini mengelola program sekaligus bekerja dan menjalani proses sebagai *learning organization* yang dipandu oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Program Sekolah Aman

Program yang diawali pada 2016 dari Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Serang (Banten) dan Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur), telah bergulir sampai hampir satu dekade dan telah menjangkau daerah-daerah lain. Sampai paruh pertama CSP 2019-2028, program ini telah berhasil membantu berbagai sekolah di daerah terpilih (**Lihat Infografis II.1.**).

Komponen program. Program Sekolah Aman memiliki tiga komponen pokok; advokasi, pemberdayaan dan bantuan langsung. Komponen advokasi diharapkan membuka jalan bagi warga untuk memastikan negara sebagai *duty bearer* melakukan penegakan (*upholding*) dan pemenuhan (*fulfilling*) hak asasi manusia. YAPPIKA menyadari bahwa pada situasi

Sebaran area Program Sekolah Aman 2016-2023



tertentu negara, dengan berbagai alasan, tidak memenuhi hak-hak asasi manusia, terutama hak atas pendidikan. Masyarakat sendiri, kadangkala kehilangan jalan untuk memastikan negara memiliki kebijakan yang menjamin penyelenggaraan pendidikan dengan cakupan dan kualitas yang selalu meningkat.

Pada situasi itu, program ini merespon dengan mendukung warga negara, sebagai *rights holder*, berbicara kepada negara yang representasinya adalah pemerintah berbagai di berbagai tingkat. Didukung fasilitator dari organisasi mitra program di tingkat lokal, warga masyarakat di lokasi program berhubungan dengan pemerintah daerah, dan menyampaikan pandangan mereka mengenai situasi sekolah.

Untuk memastikan masyarakat memiliki mekanisme partisipasi yang efektif, program ini menggunakan komponen *kedua*, yakni pemberdayaan. Komponen ini mendukung komunitas di area program membentuk wadah bagi diri mereka sendiri. Di dalam wadah

itu, bergabung para pemangku kepentingan langsung dari sekolah yang menjadi subjek advokasi dan dukungan program; guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan orangtua siswa yang mewakili juga kepentingan anak-anak mereka. Melalui komunitas itu, mereka mendiskusikan hampir semua aspek yang berkaitan dengan program perbaikan layanan pendidikan berbasis sekolah.

Agenda pembicaraan komunitas-komunitas itu beragam. Mereka telah berdiskusi tentang rencana dialog dengan pemerintah, agenda perbaikan sekolah, menyusun dan menganalisis bukti-bukti sebagai landasan argumentasi saat bicara dan negosiasi dengan pemerintah. Jika sangat diperlukan, mereka juga mampu menemukan solusi pengerjaan renovasi dan pengadaan tenaga terampil jika dimungkinkan. Komunitas Sekolah juga mampu melakukan hal-hal yang lebih rumit seperti pengawasan kebijakan dan pelaksanaan anggaran pendidikan.



Masyarakat juga dapat melakukan negosiasi dengan Pemerintah Daerah melalui Komunitas Sekolah, perihal rencana perbaikan sekolah yang menjadi tempat belajar anak-anak mereka. Negosiasi itu mungkin menghasilkan kesepakatan mengenai seberapa besar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggarannya. Ada kalanya Pemerintah Daerah tidak memiliki anggaran untuk perbaikan infrastruktur sekolah yang harus dilakukan segera. Pada situasi ini program akan menyediakan dana untuk menutup seluruh biaya perbaikan. Di situasi yang lain, program mungkin hanya perlu memikul sebagian biaya, jika Pemerintah Daerah mampu mengalokasikan anggaran untuk proyek itu. Jika Pemerintah Daerah sudah mampu menyediakan seluruh anggaran perbaikan infrastruktur, program akan mendukung pembiayaan bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan di lokasi program.

Dalam skema program ini, komunitas sekolah adalah wadah masyarakat yang berdaya untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik birokrasi pemerintah. Fasilitator menjadi pemegang kunci

proses pemberdayaan, yang menjadi prasyarat bagi komunitas sekolah untuk melakukan advokasi. Bersama fasilitator, Komunitas Sekolah menemui pemegang otoritas setempat untuk menyampaikan pemikiran mengenai pemenuhan hak anak-anak mereka atas pendidikan yang layak.

Sebagai wadah bagi warga negara, Komunitas Sekolah ternyata mampu berperan sebagai organisasi yang mengikat anggota komunitas untuk melakukan kerja kolektif seperti budidaya kebun sekolah dengan tanaman produktif yang bernilai ekonomis. Berbasis kerelawanan, anggota komunitas sekolah di semua area program mengolah kebun gizi, berisi bermacam tanaman pangan dan sayuran, atau berkolam ikan. Penghasilan dari budidaya lahan itu dialokasikan untuk perbaikan gizi siswa, pengadaan bibit tanaman dan sarana produksi, sisanya untuk insentif bagi pengelola/tenaga kerja. Sampai 2023, 1.772 anak di Kupang Dan Sumba telah menikmati manfaat kebun gizi, dari lahan seluas 10.505 m². Dinas Pendidikan Sumba Barat menggunakan pembelajaran kebun gizi itu sebagai rujukan model *Green School*.

Dengan rancangan yang fleksibel, program ini mampu merespon situasi spesifik di lokasi program. Pada beberapa lokasi program, sekolah belum memiliki fasilitas bacaan yang dapat diakses dengan mudah oleh para siswa. Program ini merespon dengan menyediakan buku-buku bacaan yang dapat diakses oleh seluruh siswa. Untuk beberapa jenis buku, siswa dan orangtua dapat membawanya pulang untuk dibaca di rumah dan dikembalikan ke Pojok Literasi untuk digunakan oleh siswa atau orangtua lainnya.

Di beberapa lokasi, program ini juga menemukan cukup banyak siswa yang belum menguasai baca-tulis. Sebagian mereka juga kesulitan mengejar ketertinggalan dalam mata pelajaran tertentu. Untuk membantu mereka mengejar ketertinggalan, program ini mendukung penyelenggaraan Balai Belajar. Melalui Balai Belajar, siswa yang membutuhkan dapat menambah jam belajarnya di rumah atau di sekolah, dengan bimbingan guru mereka sendiri.



Sebagaimana rancangan awalnya, program ini meyakini kualitas layanan pendidikan yang baik ditopang oleh empat pilar utama; akuntabilitas penyelenggaraan layanan, lingkungan yang sehat, pebelajaran yang berkualitas, dan infrastruktur yang baik. Untuk mendapatkan landasan pemahaman yang baik mengenai seluruh bangunan logika itu, Komunitas Sekolah mempelajari berbagai aspek yang dibutuhkan untuk memastikan *engagement* mereka memiliki kualitas yang baik dan membawa dampak yang bermanfaat. Didukung oleh program ini,

mereka belajar mengenai kebijakan pendidikan, pengawasan anggaran, sampai pemantauan dan penilaian kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka.

Sejak tahun 2022, program ini menambahkan tema kesiagaan bencana. Pembekalan mengenai penyusunan peta kerawanan dan rencana aksi pengurangan risiko bencana telah diberikan kepada 11 Komunitas Sekolah. Selain itu, berbagai kegiatan simulasi bencana secara mandiri telah dilakukan, melalui kerjasama dengan Bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Berikutnya, muatan inklusi sebagai tema pokok ditambahkan ke dalam program. Sejak tahun 2023, program ini menyokong peningkatan kapasitas sekolah-sekolah dampingan untuk tumbuh menjadi sekolah inklusif. Pelatihan guru-guru di Sumba Barat dan Sumba Tengah (Nusa Tenggara Timur) tentang pendidikan inklusif telah dilaksanakan untuk membantu mereka menangani pendidikan siswa berkebutuhan khusus. Pelatihan itu diikuti penetapan masing-masing dua SD di Sumba Barat dan Sumba Tengah sebagai rintisan sekolah inklusif melalui SK Dinas Pendidikan setempat, sehingga diperbolehkan menerima siswa berkebutuhan khusus.

Pelajaran Berharga. Setelah lebih dari lima tahu berjalan, Program Sekolah Aman telah memberikan manfaat bagi warga negara yang *underprivileged*, yang ada di pinggiran, yang tidak menikmati hak atas pendidikan dengan kualitas yang cukup. Lebih dari itu, PSA juga memberi YAPPIKA beberapa catatan yang penting untuk dipelajari.

Pertama, program ini utamanya digerakkan oleh anggota Komunitas Sekolah yang menjadi sentral dari upaya perbaikan layanan dasar sektor pendidikan. Ketika komunitas sekolah merasa memiliki dan bertanggung jawab atas sekolahnya, mereka akan lebih peduli terhadap perawatan dan pengembangan sekolah. Melalui berbagai kegiatan, seperti musyawarah sekolah, kelompok kerja, dan kegiatan ekstrakurikuler, komunitas sekolah terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya. Mereka belajar mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan yang diperlukan untuk lebih berdaya (*empowered*). Mereka bahkan mampu bekerja saling mendukung dalam jaringan dalam kabupaten, terutama untuk *peer learning* dan *knowledge exchange* berkaitan dengan advokasi layanan pendidikan dasar.

Kedua, meskipun bukan perkara mudah saat berurusan dengan birokrasi pemerintah, program ini meletakkan bukti (*evidence*)

sebagai pijakan utama advokasi. Hampir seluruh upaya di lokasi program mengandalkan bukti dan argumen yang dibangun di atasnya untuk meyakinkan Pemerintah Daerah mengenai langkah dan alternatif apa saja yang dapat dipilih untuk menyelesaikan tantangan layanan pendidikan. Keberhasilan advokasi oleh Komunitas Sekolah di hampir semua lokasi program ditentukan oleh seberapa banyak dan akurat bukti yang menjadi pijakan advokasi.

Ketiga, penguatan kapasitas adalah batu pengungkit yang signifikan dalam upaya perbaikan layanan pendidikan di bawah Program Sekolah Aman. Komunitas Sekolah, orangtua dan guru, yang menjadi aktor sentral dari upaya ini, berhasil meningkatkan kualitas layanan pendidikan berkat proses belajar yang mereka jalani sepanjang durasi program. Mereka yang sudah memiliki pengetahuan dari sumber-sumber lokal (*locally acquired*), mampu menggunakan pengetahuan mereka dengan dampak lebih besar setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang sesuai.

Ketiga, partisipasi bermakna di tingkat lokal tumbuh dari kepemilikan lokal (*local ownership*). Program ini dikelola di atas prinsip partisipasi dengan penghormatan terhadap kapasitas lokal. Karena itu, perbaikan layanan pendidikan di lokasi program diletakkan di atas upaya lokal, Komunitas Sekolah, para orangtua siswa dan tokoh setempat. Mereka menjadi aktor pada semua tahapan advokasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan sekolah. Mereka juga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek perbaikan itu, termasuk memastikan penggunaan material lokal yang lebih ramah lingkungan.

Keempat, upaya kolaboratif yang bersifat positif (*collaborative engagement*) antara pemerintah, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil mampu menjawab tantangan layanan pendidikan di lokasi program. Pendekatan ini terbukti masih efektif dan layak dicoba untuk situasi dan lokasi berbeda.

Kebun Gizi untuk Asupan Nutrisi Siswa

Pengembangan kebun gizi dalam Program Sekolah Aman di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur mendapatkan sambutan yang sangat baik dari pihak sekolah, komunitas sekolah, orangtua siswa dan Pemerintah Kabupaten. Didahului kajian sederhana bersama komunitas sekolah, upaya ini dimulai pada 2022 di dua sekolah dasar negeri, yakni SDN Rajaka dan SDN Inpres Hoba Jangi.

Kebun di dua sekolah itu telah memberi dua kali panen beragam sayuran seperti sawi putih, kangkung, pare belut, tomat, kacang hijau, cabai. Sebagian hasilnya telah dinikmati dalam bentuk makan bersama siswa di sekolah, dan sisanya dijual oleh komunitas sekolah dan dikonsumsi keluarga anggota komunitas sekolah dan guru. "Kami arahkan mereka untuk bersepakat membagi hasilnya, harus ada yang diserahkan ke sekolah untuk makan bersama," tutur Marcel, staf Yayasan Bahtera yang menjadi mitra PSA di Sumba Barat.

Sementara itu, Ketua Komunitas Sekolah SDN Rajaka, Markus menyebut kebun gizi sangat dibutuhkan oleh komunitas sekolah. "Hasilnya dikonsumsi dulu. Kami tidak mendorong untuk menjualnya," ujarnya sembari mengucapkan terimakasih kepada YAPPIKA dan Yayasan Bahtera. Pada akhir 2023, kebun gizi sekolah diperluas dengan kolam lele dan ikan nila.

PROGRAM DESA SEHAT

Sebagaimana Program Sekolah Aman, Program Desa Sehat adalah program flagship yang dibiayai oleh masyarakat, terutama donatur individual. Program ini dimulai oleh kajian mengenai kesehatan ibu dan anak, khususnya anak-anak yang mengalami stunting, atau terhambat pertumbuhannya. Dengan bekal temuan mengenai penyebab utama dan pilihan-pilihan jalan keluar, penanganan dan pencegahannya, program ini mulai bergulir pada 2018. Sampai dengan tahun 2022, Program Desa Sehat telah bekerja di 2 Kabupaten yakni Kabupaten Jember (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah).

Pada dasarnya Program Desa Sehat adalah upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kesehatan ibu, anak dan remaja. Program ini berbasis pendekatan partisipatif, yang mensyaratkan keterlibatan aktif masyarakat, kader posyandu, dan pemerintah desa. Keterlibatan mereka sangat vital karena sebagian besar akar masalah stunting dapat ditemukan di tingkat rumah tangga dan masyarakat. Gizi yang buruk, lingkungan dengan sanitasi dan air bersih yang tidak memadai, infeksi penyakit, kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah, serta pola asuh yang tidak tepat, semuanya menuntut intervensi di tingkat rumah tangga dan masyarakat. Karena itulah, kader Posyandu memegang peran kunci dalam pencegahan *stunting*.



Kader di garda depan. Sebagai pemain di garis depan di bidang kesehatan ibu dan anak, kader Posyandu lazim memainkan peran sebagai pemantau atau deteksi dini, edukasi, konseling, dan pemberian makanan tambahan melalui pos-pos pelayanan komunitas (Posyandu). Mereka juga terampil bekerjasama dengan tenaga kesehatan pemerintah dan mampu menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat untuk mencegah *stunting*.

Dengan kader posyandu sebagai tulang punggung, Program Desa Sehat beroperasi di Jember (Jawa Timur) melalui Program Mutiara dan di Wonosobo (Jawa Tengah) melalui Program Kelanting. Sampai 2023, Program Desa Sehat telah berhasil menjangkau 20 desa/kelurahan di dua kabupaten itu dengan layanan penguatan kapasitas ibu hamil, kader Posyandu,

tenaga kesehatan Puskesmas dan bantuan peralatan. Sepanjang usianya, Program Desa Sehat didukung oleh 223 kader Posyandu ikut serta dalam kegiatan pembekalan dan pelatihan materi yang relevan dengan tugas mereka.

Menggunakan peralatan ultrasonografi (USG) yang disediakan oleh Program Desa Sehat, para kader Posyandu secara reguler menemui para ibu hamil, memeriksa kondisi kesehatan ibu dan bayinya, memberikan konseling dan edukasi, serta memasukkan data mereka ke formulir pemantauan secara daring. Sampai 2023, para kader Posyandu di Jember dan Wonosobo telah mampu menjangkau 2.104 ibu hamil dan melakukan 4 kali pemeriksaan USG selama kehamilan. Kegesitan mereka memberikan layanan pemeriksaan telah meningkatkan jangkauan layanan dari 25 persen menjadi 69 persen dari total jumlah ibu hamil di desa.

Wardatul Hasanah: Perempuan Tangguh Desa Kaliwining

Wardatul Hasanah adalah guru PAUD sekaligus pengurus Rumah Desa Sehat di desanya, Kaliwining. Selain menjadi anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jember, perempuan 30an tahun itu juga kader Posyandu yang bekerja bersama Program Mutiara (Meningkatkan Nutrisi dan Akses Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja). Dia orang yang aktif, selalu sibuk dengan berbagai kegiatan. "Saya senang karena bisa punya banyak teman", katanya kepada Tim YAPPIKA pada 13 Juni 2023.

Di rumah, Bu Warda mengolah pekarangannya untuk kebun gizi yang didukung oleh Program Mutiara. Di atas tanah 40 m² bekas reruntuhan bangunan, ia menanam cabai, terung, kubis dan tomat. Ia sudah menyediakan 250 *polybag* untuk menambah jenis sayurannya. "Kita akan bikin rak gantung, karena lahan terbatas," tutur Hadi, pendamping lapangan dari YPSM Jember, mitra YAPPIKA sebagai pelaksana Program MUTIARA.

Kebun gizi ini ada di bekas reruntuhan rumah kakaknya yang runtuh karena tidak ditinggali lagi. "Suami yang bersihkan, Mas," kata Bu Warda. Tukiman, suami Bu Warda, memang mendukung kegiatan istrinya yang bermanfaat. Ia juga membantu mengurus kebun gizi itu. "Saya bantu siram dan bersihkan", katanya saat sambil melihat-lihat kebun.

Bu Warda memang orang yang bersemangat. Energinya banyak. Begitu pula suaminya. Saat Tim YAPPIKA mengusulkan penambahan kolam dan ayam, mereka antusias dan siap melakukannya.

Melengkapi strategi. Selain pemeriksaan dan pemantauan kondisi kehamilan, layanan lain yang didukung oleh Program Desa Sehat adalah pemberian makanan tambahan (PMT) di Posyandu. Ini adalah salah satu metode utama pencegahan *stunting*; mencukupi kebutuhan nutrisi ibu hamil. Hasilnya, di Kabupaten Jember, jumlah ibu hamil yang mengalami anemia berkurang dari 14 persen menjadi 8 persen, dan ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) turun dari 19 persen menjadi 14 persen dari populasi di area program. Selain ibu hamil, bayi berusia kurang dari lima tahun (Balita) juga mendapatkan layanan makanan tambahan dan pemantauan pertumbuhan. Layanan PMT untuk 258 balita dengan permasalahan gizi, dan layanan pertumbuhan dengan alat antropometri berstandar telah menyumbang penurunan prevalensi bayi *underweight* atau kurang berat badan dari 12 persen menjadi 7,18 persen.

Catatan di atas cukup menggembirakan, menunjukkan strategi mencegah *stunting* di

tingkat rumahtangga dan komunitas berhasil dengan baik. Namun, untuk mencukupi sebagian kebutuhan nutrisi keluarga, Program Desa Sehat menyokong pengembangan Kebun Gizi Komunal. Secara konseptual, Kebun Gizi Komunal adalah kerja kolektif, melibatkan para kader Posyandu dan perempuan setempat, mengolah lahan milik desa atau pribadi, untuk menyediakan bahan pangan dan nutrisi keluarga, terutama ibu hamil. Strategi ini cukup efektif dalam lingkup masyarakat dengan ikatan komunal yang kuat seperti di desa-desa lokasi program. Hasilnya, 129 keluarga di Kabupaten Jember sudah mampu mencukupi sebagian kebutuhan nutrisi secara mandiri, berkat budidaya tanaman pangan di pekarangan rumah masing-masing. Selain itu, telah terbentuk 26 kebun gizi komunal di atas beberapa petak lahan dengan luas total 2.000 m². Sebagian kebun gizi komunal dibuat di atas lahan milik dua pondok pesantren di dua desa berbeda. Di kebun gizi komunal itu juga tersedia beberapa kolam dengan 30.000 ekor ikan lele dan 10.000 batang tanaman sayur.

Dari sini terlihat peran dan kerelawanan kader Posyandu sangat esensial, mereka adalah katalisator bagi proses pencapaian perubahan. Masyarakat desa, dengan kekayaan modal sosial yang hidup dalam keseharian, mampu bergerak secara kolektif, menyediakan layanan sosial berbasis komunitas, sekaligus menggerakkan sumberdaya untuk menjawab sebagian tantangan kesehatan masyarakat. Kerelawanan dan partisipasi itu telah mendorong perubahan perilaku di tingkat anak muda (remaja) di desa. Seiring kapasitasnya yang meningkat, 361 anak muda (218 perempuan, 143 laki-laki) telah menjadi lebih aktif dalam agenda kampanye (promosi) isu kesehatan remaja dan survei gizi keluarga.

Advokasi kebijakan. Sebangun dengan Program Sekolah Aman, Program Desa Sehat juga mendukung upaya advokasi kebijakan. Tim YAPPIKA terlibat dalam tim penyusun substansi Draft Peraturan Bupati tentang Penurunan *Stunting* dan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Jember. Selain draft Perbup itu, lini advokasi kebijakan berhasil menggolkan penambahan alokasi anggaran untuk intervensi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di 10 desa sasaran. Masing-masing desa mendapatkan tambahan anggaran KIA antara Rp30 juta sampai Rp 40 juta per tahun.

Integrasi tema baru. Di tahun 2023, YAPPIKA yang didukung FORD Foundation, mencoba mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam advokasi pelayanan publik. Meskipun dikeola di bawah program berbeda, YAPPIKA berkolaborasi dengan FITRA Jabar di Sukabumi dan KITA Institute di Wonosobo, untuk memperkuat kapasitas warga di lokasi proyek energi panas bumi (geothermal). Kerjasama ini dirancang untuk menguji penggunaan *citizen report card* dan penanganan keluhan yang lebih optimal oleh Pemerintah Daerah.

Mencakup empat desa sasaran (Sikunang dan Campur Sari di Wonosobo, dan Pulosari dan Cipeteuy di Sukabumi), program pemodelan ini melibatkan 80 orang anggota komunitas warga dan 50 pegiat OMS dalam penguatan kapasitas

pengawasan publik. Hasil dari pemantauan mereka dibawa ke forum dialog kebijakan. Dalam forum itu dua usulan perbaikan kebijakan kesehatan dan kebencanaan dari warga di Dieng telah ditanggapi dengan cukup baik. Pemda Wonosobo melakukan pemeriksaan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di masyarakat terdampak proyek energi panas bumi, dan simulasi tanggap bencana oleh BPBD. Setelah ditemukan berbagai persoalan di area proyek energi panas bumi, program ujicoba model akuntabilitas ini ditindaklanjuti dengan memanfaatkan strategi intervensi yang didukung Program Desa Sehat.

Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Bangda Kemendagri, YAPPIKA telah memberi pelatihan optimalisasi perencanaan berbasis SPM kepada 65 aparatur Pemda Wonosobo dan Sukabumi.

Pelajaran Berharga. Selama periode 2017-2023, Program Desa Sehat YAPPIKA ada sejumlah pembelajaran penting, antara lain:

- **Kader adalah kunci.** Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia, adalah ujung tombak pelaksanaan program di tingkat desa. Kapasitas yang baik akan mengangkat kualitas dan membantu pencapaian program secara keseluruhan. Meningkatkan kapasitas mereka dengan tema, moda, dan instruktur/mentor yang sesuai akan selalu membuahkan hasil.
- **Peran Pemerintah:** Pemerintah, bahkan pada level terbawah, adalah pemegang kuasa anggaran yang dibiayai oleh sumber-sumber publik. Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah desa menentukan keberlangsungan program.
- **Intervensi di area yang tepat.** Mengarahkan upaya di area yang tepat dapat menentukan hasil secara signifikan. PDS menunjukkan intervensi gizi seperti pemberian makanan tambahan, kebun gizi, dan rembug stunting terbukti efektif karena secara langsung membidik persoalan di area yang tepat dengan solusi yang relevan.



**STRENGTHENING CIVIL SOCIETY
ORGANIZATION CAPACITY**



PENINGKATAN KAPASITAS DAN ORGANISASI YANG BELAJAR

Penguatan kapasitas untuk organisasi masyarakat sipil adalah salah satu mandat klasik YAPPIKA. Mandat ini adalah klasik karena formulasinya sudah ada dan dilaksanakan sejak 1997, setelah enam tahun organisasi ini bekerja membawa misi kerjasama Indonesia-Kanada. Peningkatan kapasitas OMS tetap menjadi bagian dari misi organisasi, bahkan setelah organisasi ini bergabung dengan federasi ActionAid International pada 2016 dan menggunakan jenama YAPPIKA-ActionAid untuk komunikasi publik.

Afiliasi dengan Federasi ActionAid International memberi kami kerangka kerja baru menyangkut kepemimpinan perempuan, serta aksi kemanusiaan dan ketangguhan terhadap bencana. Kerangka kerja baru itu membuat cakupan kerja YAPPIKA makin lebar, yang berarti tanggungjawab lebih besar untuk menjalankan upaya kemanusiaan. Dari irisan besar pada misi awal dua organisasi itu, kerangka kerja baru itu berdampingan secara serasi dengan misi peningkatan kapasitas OMS. Pada beberapa kesempatan, misi kemanusiaan dan peningkatan kapasitas OMS terhubung dan saling mendukung.



OCPAT (*Organizational Capacity Performance and Assessment Tools*)

Dengan mandat penguatan kapasitas, pada 2009 YAPPIKA berhasil mengembangkan alat untuk menakar kapasitas organisasi yang kami beri nama *Organizational Capacity and Performance Assessment Tools* (OCPAT). Instrumen itu berasal dari akumulasi pengalaman YAPPIKA dengan berbagai alat penilaian kapasitas organisasi masyarakat sipil, seperti OCA (*Organizational Capacity Assessment*) yang digunakan secara luas oleh USAID, ODST (*Organizational Development Snapshot Tools*), dan beberapa alat lainnya. Layaknya organisasi pembelajar, YAPPIKA memberi kredit kepada berbagai organisasi yang telah lebih dulu mengembangkan perkakas pengukuran dan peningkatan kapasitas organisasi.

OCPAT dibangun tidak melulu untuk menilai kapasitas OMS di Indonesia. Dengan wataknya yang cukup lentur untuk disesuaikan dengan karakter organisasi tertentu, OCPAT membantu organisasi mengenali kelemahan dan kekuatan serta memetakan ruang perbaikan mereka. YAPPIKA percaya hasil OCPAT membantu OMS tumbuh dan menjaga siklus pembelajaran berdasar kekuatan dan kelemahan yang dipetakan dalam lima komponen internal organisasi; orientasi organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program, keberlanjutan dan kinerja organisasi. OCPAT juga mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perubahan organisasi.

Pasca penilaian kapasitas, OMS dapat melanjutkan proses dengan menyusun rencana pengembangan organisasi yang mencakup kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia, pemrograman, strategi jaringan, dan advokasi kebijakan. Untuk kebutuhan itu, YAPPIKA telah menyiapkan fasilitator, mentor maupun perkakas pelatihan yang terus disempurnakan setelah digunakan dalam berbagai kesempatan.



Tantangan peningkatan kapasitas OMS.

OCPAT sejak semula dikembangkan sebagai perkakas pengukuran dengan cakupan yang komprehensif: pemetaan kekuatan dan kelemahan, perumusan tujuan dan pengembangan strategi, pemantauan kemajuan, serta pengelolaan proses belajar dan pengembangan organisasi. Karenanya penilaian kapasitas organisasi dengan OCPAT diharapkan tidak berhenti pada tahapan pengukuran kapasitas. Namun, setelah 15 tahun penggunaan OCPAT untuk 150 OMS, baru sebagian yang melakukannya lebih dari satu kali, sehingga perkembangan kapasitasnya terpantau.

Dalam pandangan YAPPIKA, peningkatan kapasitas organisasi adalah investasi jangka panjang dengan *capital outlay* yang berulang-ulang sebelum manfaatnya menjadi signifikan bagi OMS Indonesia. Namun, dalam populasi OMS Indonesia yang besar, YAPPIKA menyadari bahwa pengukuran dan pengembangan

kapasitas secara sistematis belum menjadi arus utama dalam praktik pengelolaan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Masih banyak OMS Indonesia yang mengecualikan peningkatan kapasitas dari rencana organisasi. Mereka mengukur kapasitas organisasi secara insidental dan *by project, piece meal*, tanpa koherensi yang tegas dengan misi organisasi. Dengan OCPAT, YAPPIKA menyiapkan dukungan alat dan fasilitator yang dapat diakses oleh OMS Indonesia untuk memandu proses pengukuran kapasitas sampai penyusunan rencana tindak lanjutnya.

Peningkatan kapasitas organisasi tampaknya masih akan menjadi arus pinggir, sampai terobosan di sektor pembiayaan OMS ditemukan. Sebagai organisasi pendukung masyarakat sipil melalui peningkatan kapasitas, YAPPIKA melihat berbagai model pembiayaan dan pengelolaan non konvensional telah muncul di lanskap masyarakat sipil Indonesia.

CSP 2019-2028 menetapkan target bagi YAPPIKA untuk melakukan pembenahan tatakelola organisasi di 50 kabupaten/kota. Dengan mandat advokasi kebijakan, YAPPIKA juga memikul target menguatkan kemampuan OMS dalam mempengaruhi kebijakan publik dan melayani konstituennya di 50 kabupaten/kota, dan menumbuhkan organisasi sumber daya di tingkat lokal, setidaknya di lima lokasi.

Dari tahun 2019 hingga 2023, YAPPIKA telah menggunakan OCPAT pada 53 OMS di Indonesia dan mendampingi mereka meningkatkan berbagai kemampuan teknis dan tematik. Jika penguatan kapasitas dalam berbagai program YAPPIKA pada kurun yang sama ikut dihitung, jumlah itu naik menjadi 198 OMS.



Eka Munfarida, Direktur Kita Institute: Lebih dari Kerjasama Biasa

Kita Institute yang berkantor di Wonosobo, Jawa Tengah, bekerja di sektor perlindungan hak-hak perempuan, khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan buruh migran, ekonomi rumah tangga dan lingkungan hidup. Organisasi ini didirikan pada 30 April 2008, atas prakarsa aktivis OMS, mahasiswa, dan perempuan tokoh agama.

Mulai tahun 2022, Kita Institute bermitra dengan YAPPIKA untuk Program Desa Sehat. Di Wonosobo, program ini bekerja dengan komunitas-komunitas yang terdampak proyek geotermal, yang sebagian besar ada di wilayah dataran tinggi Dieng. "Bagi kami, kemitraan dengan YAPPIKA lebih dari kerjasama biasa," tutur Eka Munfarida, yang menjabat Direktur Eksekutif Kita Institute sejak 2018.

Kerjasama PDS dengan Kita Institute tidak sebatas penugasan pelaksanaan. Dalam kerjasama itu YAPPIKA juga mendukung Kita Institute mengembangkan beberapa kapasitas. Pendekatan yang fleksibel memungkinkan dukungan pengembangan kapasitas itu diselenggarakan sesuai kebutuhan organisasi mitra. Kelenturan itulah yang memungkinkan Kita Institute mendapatkan pelatihan bidang penelitian dan survey, pengorganisasian komunitas dan advokasi, perancangan dan pelaporan program, serta administrasi keuangan. Setelah waktu berlalu, dukungan pengembangan kapasitas itu, misalnya di bidang pelaporan keuangan, mulai terlihat. "Laporan keuangan 2023 Kita Institute telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian," papar Eka.

Selain kapasitas teknis, YAPPIKA juga mendampingi Kita Institute menyusun dan menerapkan protokol pengamanan (*safeguards*) yang penting untuk pencegahan eksploitasi, perundungan dan pelecehan seksual atau PSEAH (*Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment*). Dari kerjasama PDS lini advokasi Kita Institute berhasil memanfaatkan kapasitas riset dan survey untuk mendapatkan pengalaman tangan pertama dialog dan intervensi kebijakan pengurangan *stunting* di Wonosobo.



CIVIC SPACE ADVOCACY



MELAWAN KEMEROSOTAN RUANG SIPIL YANG MULTIDIMENSI

Setidaknya dalam lima tahun terakhir, ruang sipil di Indonesia menyempit signifikan. Berbagai kebijakan dan praktik membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat telah mengancam keberlangsungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2020, kita mendapati pembubaran dan wajib daftar ormas sebagai ancaman yang nyata bagi kebebasan sipil. Pembubaran ormas tanpa proses hukum adalah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk membungkam suara kritis dan oposisi rakyat. Sedangkan kewajiban bagi ormas untuk mendaftar dan memenuhi berbagai persyaratan menjadi alat untuk membatasi ruang gerak organisasi masyarakat.

Beriringan dengan itu, negara telah mempraktikkan proses pembentukan undang-undang yang mengabaikan partisipasi rakyat. UU Cipta Kerja yang biasa disebut Omnibus Law adalah contoh undang-undang yang dibentuk secara semena-mena oleh Pemerintah dan DPR, mengabaikan aspirasi rakyat. Undang-undang yang lahir dari proses tidak transparan dan inklusif itu cenderung menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

Omnibus Law juga menjadi contoh bagaimana negara mengerahkan pendengung (*buzzer*) untuk menyebarkan informasi menyesatkan, membentuk kesadaran palsu, dan menggalang dukungan tanpa kekritisan dari masyarakat awam. Lebih dari itu, pendengung itu juga menciptakan polarisasi yang menghambat dialog secara sehat.

Bukan hanya pendengung dan robot yang aktif bekerja untuk negara, ancaman terhadap kebebasan sipil di ruang digital juga datang dari UU No. 19 tahun 2016, atau yang populer disebut UU ITE. Undang-undang yang semula --UU No. 11 Tahun 2008-- dibuat untuk melindungi warga negara dari perundungan digital dan membatasi transaksi elektronik untuk kejahatan, pada akhirnya lebih banyak menjerat suara kritis dan pro demokrasi dari kalangan aktivis, jurnalis, dan warga negara lainnya. Sejak 2017, pemidanaan dengan UU ITE cenderung naik. SAFEnet, dalam laporannya *Robohnya Hak-hak Digital Kami* mencatat ada 48 kasus pada 2017. Jumlah itu naik menjadi 96 kasus di tahun 2018, dan 170 kasus tahun 2019. Tahun 2022 kasus pemidanaan dengan UU ITE mencapai 207, dan menjadi 97 kasus tahun berikutnya.





Ruang sipil masih juga terdesak oleh praktik impunitas, serangan terhadap pembela HAM (*human rights defender*), penyadapan dan serangan siber seperti *doxing* serta impersonasi. Setelah catatan itu, kita masih bisa menyusun ancaman-ancaman lain dalam satu daftar panjang ancaman terhadap ruang sipil. Karena itulah, YAPPIKA bekerja bersama banyak OMS lain mempertahankan ruang sipil dari kemerosotan dan penyempitan lebih jauh.

PP3 memberi mandat YAPPIKA untuk mewujudkan beberapa hal. *Pertama*, kerangka hukum yang melindungi keberadaan masyarakat sipil. *Kedua*, meningkatnya pemahaman dan kapasitas pelaksana kebijakan mengenai jaminan kebebasan berorganisasi dan berkumpul. *Ketiga*, meningkatnya pemahaman dan dukungan komunitas yang bekerja dengan YAPPIKA, untuk memajukan kebebasan berorganisasi dan berkumpul. *Keempat*, tumbuh dan menguatnya toleransi di kalangan anak muda terhadap keberagaman Indonesia.

Empat ambisi besar di atas membutuhkan usaha ekstra untuk mewujudkannya. Lebih dari itu, semuanya dirumuskan oleh YAPPIKA untuk merespon tantangan yang dihadapi masyarakat sipil. Keterlibatan YAPPIKA dalam Koalisi Kebebasan Berserikat adalah cara mencapai tujuan itu. Dengan masuk ke dalam koalisi, YAPPIKA ikut menggalang kekuatan kolektif OMS, untuk menyatukan suara dan memperkuat advokasi untuk dampak yang lebih luas. Selain itu, koalisi itu juga menunjukkan kepada negara bahwa ancaman terhadap kebebasan berserikat telah menjadi kekhawatiran kalangan yang luas.

Untuk mewujudkan kerangka hukum yang menjamin kebebasan berorganisasi, YAPPIKA mengusulkan pembahasan RUU Perkumpulan ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) *Open Government Indonesia* (OGI) bersama dengan enam usulan komitmen tentang *civic space* lainnya. Empat dari tujuh usulan YAPPIKA terpilih masuk ke dalam RAN OGI, meskipun usulan pembahasan RUU Perkumpulan tidak masuk ke dalam RAN.

Melengkapi upaya melalui jalur eksekutif itu, YAPPIKA bersama sejumlah OMS mendorong perbaikan praktik keterbukaan dalam tata kelola kelembagaan DPR RI melalui inisiatif *Open Parliament Indonesia* (OPI). Pada inisiatif ini, YAPPIKA mengusulkan peningkatan layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat di DPR RI.

Sebagai *Co-coordinator* Aliansi Filantropi dan Akuntabilitas Sumbangan, YAPPIKA menghasilkan *policy brief* berjudul *Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Berkelanjutan melalui Revisi Kebijakan Pengumpulan Uang dan Barang*. YAPPIKA juga terlibat dalam perbaikan naskah akademik dan RUU Penyelenggaraan Sumbangan versi masyarakat sipil. Pada arena yang lebih luas (kebijakan internasional), YAPPIKA bersama YLBHI telah menghasilkan dan mengirimkan laporan kepada UNSR FoAA (*United Nation's Special Rapporteur on Freedom of Assembly and Association*), tentang akuntabilitas pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia.

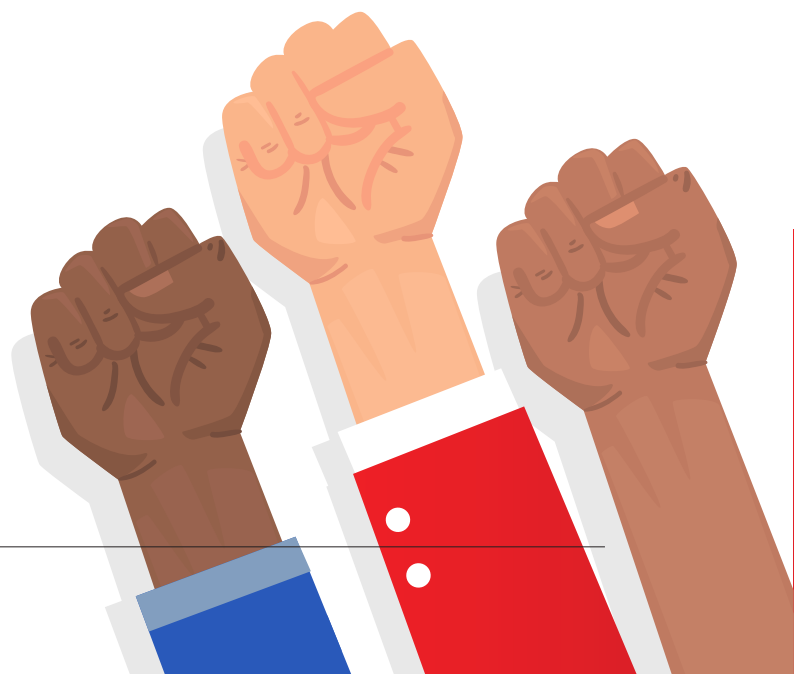
Selama 2023, YAPPIKA terus meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaksana kebijakan terkait kebebasan berorganisasi dan berkumpul melalui sejumlah kegiatan dialog. YAPPIKA memanfaatkan ruang pembahasan RAN OGI 2023-2024 untuk memberikan membekali Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, hingga Kedeputan Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dengan pandangan mengenai urgensi RUU Perkumpulan.

YAPPIKA bersama Aliansi Filantropi juga berhasil meyakinkan Puspanlak DPR RI untuk menerima temuan dan masukan kami ke dalam kajian mereka mengenai ruan bagi OMS dalam pengumpulan uang dan barang. Masukan kecil itu akan masuk dalam agenda pembahasan legislasi nasional di DPR RI. Di lini eksekutif, melalui dialog yang intens YAPPIKA berhasil mendapatkan komitmen Kemenko PMK untuk memfasilitasi proses perubahan PP 29/1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Guna memperkuat pemahaman dan dukungan komunitas tentang jaminan kebebasan berorganisasi dan berkumpul, YAPPIKA menerbitkan Buku Saku Swakelola Tipe 4 kepada kelompok masyarakat yang menjadi dampingan langsung program. Dengan panduan tersebut, komunitas warga dapat mengenali mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses untuk mendukung kegiatan-kegiatan mereka. Di lingkungan tingkat anak muda, YAPPIKA terlibat aktif dalam proses diseminasi hasil penelitian orang muda Myanmar yang diselenggarakan oleh ASEAN Youth Forum untuk menguatkan toleransi di kalangan mereka.

Setelah 5 tahun menurunkan *Country Strategy Paper 2019-2028* menjadi beragam program, ancaman terhadap ruang sipil belum terlihat surut. Tantangan yang dihadapi masyarakat sipil dalam lima tahun mendatang tampaknya akan lebih besar dibanding keberhasilan-keberhasilan kecil sudah diraih di lima tahun sebelumnya. Mempertahankan ruang sipil harus diupayakan terus, *a work never done*.

Dari semua upaya itu, YAPPIKA menemukan dukungan khalayak luas adalah vital dalam advokasi. Bertahan dari dalam dengan meningkatkan kapasitas organisasi tidak cukup untuk mempertahankan ruang sipil dari penyempitan. Mempengaruhi aktor-aktor eksternal seperti pemerintah dan sektor privat adalah krusial bagi keberhasilan advokasi.





HUMANITARIAN AND RESILIENCE



LIMA TAHUN YANG PENUH ANCAMAN

Berbagai buku, tulisan dan laporan kebencanaan tentang Indonesia biasanya mengambil latar belakang posisi geografis; sabuk gunung api yang melingkari beberapa lempeng tektonik, termasuk Lempeng Besar Pasifik, Filipina, Juan de Fuca, Cocos dan Nazca. Beberapa peristiwa kegunungapian telah terjadi sepanjang sabuk yang dikenal sebagai Pacific Ring of Fire, meninggalkan jejak yang nyata di alam. Dua di antaranya adalah letusan Krakatau (1883) dan Tambora (1915). Sejak tahun 2000, peristiwa-peristiwa bencana alam yang signifikan antara lain; tsunami Samudera India (2004), gempa tektonik Jogjakarta (2006), banjir lumpur Sidoarjo (2006), erupsi Merapi (2010), gempa bumi dan tsunami Mentawai (2010), tsunami Selat Sunda (2018), pandemi Covid-19 (2020), gempa dan tsunami Palu (2021).

Periode 2019-2023 meninggalkan gambaran yang rumit mengenai aksi kemanusiaan di Indonesia. Di satu sisi, kita menyaksikan peningkatan kesadaran dan kapasitas dalam merespons bencana serta isu-isu kemanusiaan lainnya. Namun di sisi lain, kita seperti melihat kegagapan yang sangat luas ketika pandemi COVID-19 menerpa Indonesia dan memunculkan banyak sekali kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Pandemi memaksa pemerintah untuk mengalihkan sebagian besar sumber daya untuk penanganan COVID-19, sehingga upaya penanggulangan bencana lainnya menjadi terkendala. Namun, pandemi juga menjadi momentum untuk melakukan inovasi dalam penanggulangan bencana, seperti pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi dan koordinasi.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat harapan bahwa kesiapsiagaan bencana di Indonesia akan terus meningkat. Peningkatan kesadaran masyarakat, perkembangan teknologi, serta komitmen pemerintah untuk mengurangi risiko bencana merupakan langkah

positif. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam membangun Indonesia yang lebih tangguh terhadap bencana.

Sejauh ini kita dapat melihat perbaikan pada kordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, OMS dan sektor privat dalam merespon bencana. Dalam situasi tanggap darurat, keduanya akan memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Peningkatan itu juga diiringi dengan menmguatnya fokus pada mitigasi risiko dan kesiapsiagaan melalui peringatan dini (*early warning system*), pelatihan masyarakat, kepeloporan desa dan komunitas siaga bencana, serta investasi pada infrastruktur yang tahan bencana.

Selain itu, kita juga melihat kemenangan kecil gerakan kesetaraan gender dan inklusi yang embuat dua dimensi itu makin terintegrasi dalam upaya kemanusiaan. Kebutuhan dan hak-hak khusus kelompok rentan seperti perempuan, anal-anak, penyandang disabilitas dan kelompok minoritas mendapat perhatian yang cukup. Dengan konteks di atas, YAPPIKA-ActionAid merasa telah mengambil keputusan yang tepat mengenai **Prioritas Program 4 Aksi Kemanusiaan dan Ketangguhan** (*Humanitarian and Resilience*). PP 4 ini memiliki lima indikator yaitu; 1) Meningkatnya ketangguhan komunitas dalam memulihkan diri secara efektif dari dampak bencana; 2) Program perlindungan berbasis komunitas yang dipimpin perempuan terintegrasi dalam struktur komunitas; 3) Rencana-rencana kesiapan kebencanaan komunitas tersedia dan berjalan; 4) Komunitas-komunitas dapat melakukan kampanye dan advokasi untuk memitigasi risiko-risiko bencana; dan 5) Kebijakan-kebijakan nasional dalam manajemen kebencanaan dipengaruhi melalui penelitian dan bukti-bukti dari partisipasi masyarakat.

Melalui Program ANCP (*Australian NGO Cooperation Programme*), sepanjang 2023 YAPPIKA-ActionAid bekerja dengan 101 perempuan dari 15 kelompok ekonomi untuk memperkuat kelentingan mereka melalui usaha ekonomi dan pra koperasi simpan pinjam. Penguatan kelompok ekonomi perempuan tersebut dilandasi oleh solidaritas sosial dengan membangun kesadaran kritis melalui berbagai kegiatan produksi serta pemanfaatan potensi sumber daya lokal desa untuk mengatasi kecukupan gizi dan membangun fondasi kedaulatan pangan di tingkat desa.

Selain menyasar kelompok perempuan, melalui Program WLCBP (*Women-Led Community-Based Protection*) YAPPOIKA-ActionAid juga mendampingi kelompok anak muda di Desa Taman Jaya, Pandeglang, Banten. Bersama mereka YAPPIKA-ActionAid mengembangkan produksi minuman herbal dan kosmetik alami, memanfaatkan solidaritas sosial untuk keberlanjutan ekologi. Di area yang sama, Program ANCP juga memfasilitasi kelompok anak muda itu untuk bekerjasama dengan Pondok Pesantren Ekologi Garut, Sekolah Ekologi Indonesia, Redaktur Majalah Pertanian Trubus, dan lainnya.

Program ANCP telah menjangkau sekitar 2.000 orang, sebagian besar perempuan baik di kelompok orang dewasa maupun anak-anak dan remaja dalam layanan perlindungan dan penguatan kapasitas (Lihat infografis). Program ini juga telah mendapatkan 78 aktivis komunitas yang berperan sebagai *focal point* paralegal untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*, GBV). Para aktivis komunitas itu juga berhasil menjalin kontak dengan jaringan aktor di tingkat nasional maupun sub-nasional.

Untuk memperkuat perlindungan perempuan, di akhir tahun 2023 YAPPIKA-ActionAid bersama jaringan CWGI (*CEDAW Working Group Indonesia*) telah menghasilkan instrumen pemantauan implementasi CEDAW terhadap situasi perempuan dalam bencana/krisis kemanusiaan. Instrumen ini telah diuji coba untuk memantau implementasi CEDAW di Indonesia terkait pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan dalam situasi bencana dengan melibatkan pemerintah, jaringan CSO dan komunitas. Teuan dari pemantauan itu antara lain; i) Data pilah (*disaggregated data*) dan kelompok rentan di wilayah rawan bencana di tingkat nasional belum tersedia sejak tahap prabencana; ii) Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan bencana masih sangat minim, termasuk keterwakilan dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB); iii) Perlindungan terhadap perempuan dari GBV belum mengintegrasikan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender pra-bencana dan pascabencana. Penanganan GBV juga belum melibatkan penegak hukum dan lembaga layanan berbasis masyarakat; iv) Pengarusutamaan gender (PUG) bagi pekerja kemanusiaan masih terbatas dan sektoral. Belum ada kebijakan yang peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan, pekerja kemanusiaan, dan aparat pemerintah; dan v) Program promosi kesehatan reproduksi belum mengakomodasi berbagai persoalan struktural berbasis gender yang dialami perempuan. Akses layanan kesehatan reproduksi seringkali terhambat oleh stigma terhadap perempuan mengenai status perkawinan mereka.



292 warga

👤 **196** perempuan 👤 **96** laki-laki

aktif berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk menyelenggarakan simulasi bencana inklusif di tingkat rumah tangga dan desa



Simulasi bencana ini melibatkan

- Organisasi penyandang disabilitas
- Pemerintah desa
- BPBD
- Dinas Sosial
- PMI
- Tim Destana (Desa Tangguh Bencana) tingkat kabupaten.

Dari tahun ke tahun eksistensi YAPPIKA dalam manajemen bencana terus menguat dan mendapat pengakuan dari aktor-aktor kunci, termasuk pemerintah. Pada pertengahan 2023, YAPPIKA-ActionAid terlibat sebagai Tim Fasilitator Nasional SPAB yang dibentuk oleh Kemendikbud. Dengan adanya kesempatan ini, YAPPIKA dapat memasukkan berbagai pembelajaran organisasi ke dalam modul SPAB. Tidak hanya itu, YAPPIKA bersama KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) telah berkolaborasi sehingga menghasilkan model DKRPPA (Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak) dalam situasi bencana/krisis iklim. Model ini akan diuji coba di Poso dan beberapa wilayah kerja KPPA di tahun 2024.

Dari tahun 2019-2023, kita mencatat beberapa pelajaran penting;



Pentingnya Koordinasi dan Kolaborasi: Koordinasi yang kuat antara berbagai aktor dalam aksi kemanusiaan sangat penting untuk memastikan respons yang efektif dan efisien.



Kesiapsiagaan Masyarakat: Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana sangat penting untuk mengurangi dampak negatif bencana.



Fleksibilitas dan Adaptasi: Sistem kemanusiaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi dan konteks.

PP4 *Humanitarian Action and Resilience* selama periode 2019-2023 telah ikut membawa hasil yang cukup menggeburkan. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap bantuan kemanusiaan yang mereka butuhkan. Dengan terus belajar dari pengalaman masa lalu dan beradaptasi dengan perubahan, kita dapat membangun sistem kemanusiaan yang lebih kuat dan tangguh di masa depan. Pendanaan yang berkelanjutan dan pembiayaan yang cukup dan berkelanjutan sangat penting untuk menjamin keberlangsungan aksi kemanusiaan.



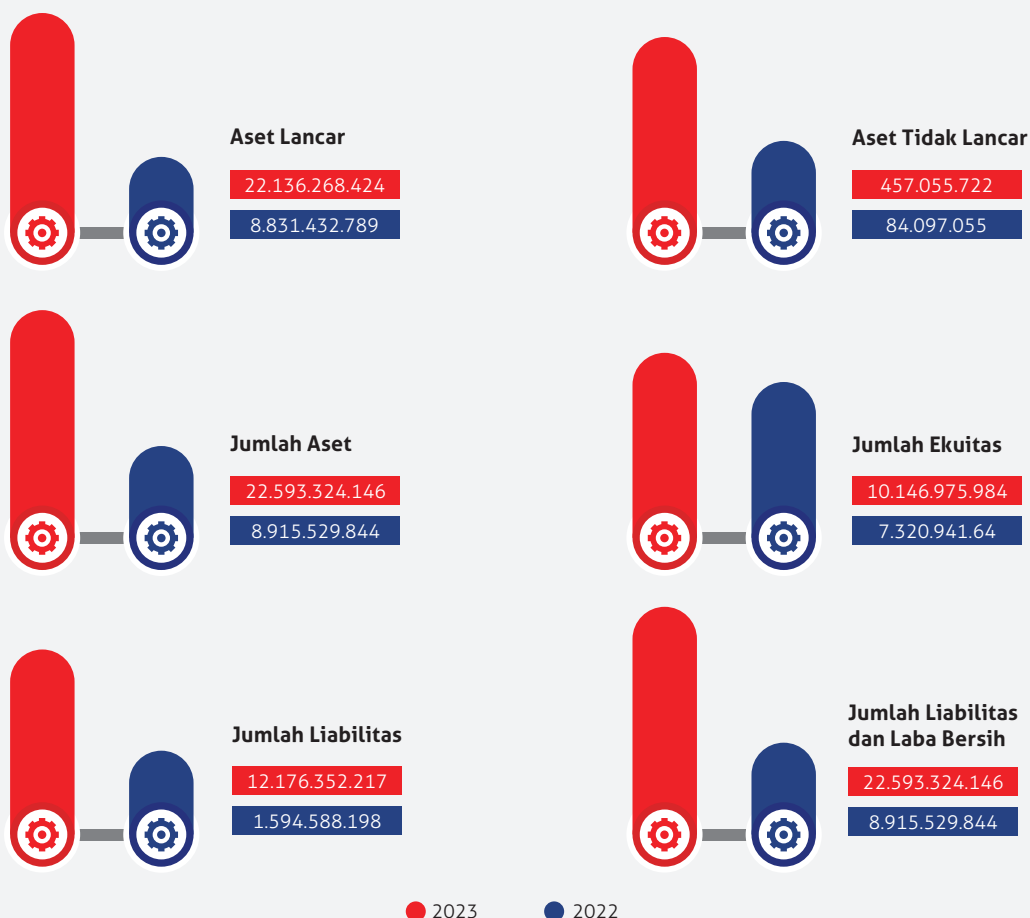
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan YAPPIKA-ActionAid yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Syarif Basir & Rekan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SA dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Laporan Posisi Keuangan	2023	2022
ASET		
Aset Lancar	22.136.268.424	8.831.432.789
Aset Tidak Lancar	457.055.722	84.097.055
Jumlah Aset	22.593.324.146	8.915.529.844
LIABILITAS DAN ASET BERSIH		
Liabilitas	12.176.352.217	1.594.588.198
Ekuitas	10.146.975.984	7.320.941.64
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	22.593.324.146	8.915.529.844

Laporan Penghasilan Komprehensif	2023	2022
Pendapatan	35.479.906.361	31.821.073.489
Beban	32.653.872.027	30.238.805.641
Surplus (Defisit)	2.826.034.334	1.582.267.848

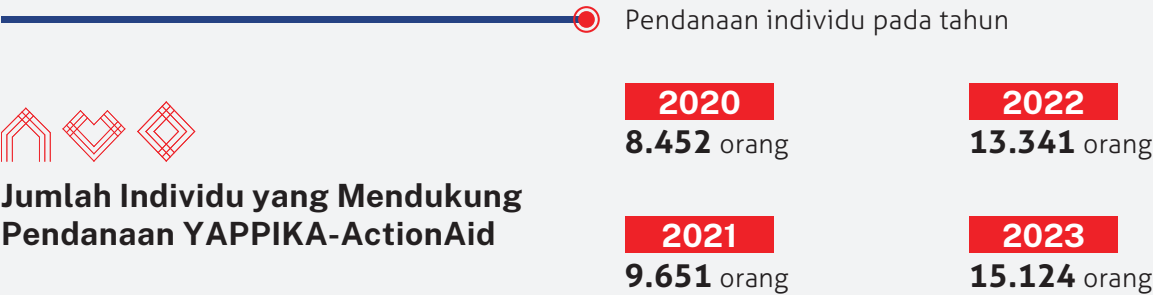


PENGALANGAN DANA PUBLIK

Tren Pertumbuhan Dukungan Publik yang Konsisten

Grafik pertumbuhan donatur individu YAPPIKA-ActionAid dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif yang konsisten. Peningkatan ini menjadi penanda penting di tengah lanskap filantropi nasional. Laporan World Giving Index oleh Charities Aid Foundation (CAF) periode 2022–2024 memang menempatkan Indonesia sebagai bangsa paling dermawan sedunia. Namun, perlu dicatat bahwa kedermawanan tersebut sebagian besar ditunjukkan melalui sumbangan pada isu-isu yang berkaitan dengan keagamaan.

Dalam konteks tersebut, pertumbuhan donatur individu yang dialami YAPPIKA-ActionAid menjadi secercah harapan sekaligus bukti bahwa kepedulian dan kedermawanan publik untuk isu-isu di luar sektor keagamaan juga terus berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena serupa juga dapat diamati dari semakin banyaknya organisasi masyarakat sipil (OMS) yang menggalang donasi individu melalui berbagai kanal, seperti kampanye tatap muka (*face-to-face*), pemanfaatan platform *crowdfunding*, hingga kanal-kanal digital lainnya.



Pembelajaran

Dari upaya penggalangan dana publik yang terus berjalan, terdapat beberapa pelajaran berharga yang dapat dipetik:

Menggalang dana publik untuk mendukung isu-isu di luar sektor keagamaan memiliki peluang besar di Indonesia, meskipun tidak dapat dikatakan mudah. Keberhasilan upaya ini menuntut sejumlah prasyarat fundamental, di antaranya: pesan kampanye yang kuat dan dapat dipahami oleh publik luas, reputasi organisasi yang baik dan terpercaya, pemanfaatan kanal rekrutmen donatur yang tepat, serta kesiapan perangkat pendukung penggalangan dana (sumber daya manusia, teknologi transaksi keuangan, dan standar prosedur operasi), hingga sistem pengelolaan dan layanan donatur yang mumpuni.

Apabila ditarik ke tataran yang lebih makro, berkembangnya donasi publik non-keagamaan merupakan penanda tumbuhnya gerakan sosial atau aktivisme yang lebih variatif di Indonesia. Gerakan ini sangat penting untuk menopang kemandirian finansial organisasi masyarakat sipil (OMS) agar dapat secara berkelanjutan menjalankan visi, misi, dan perannya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Untuk terus mengembangkan penggalangan dana dari donasi individu, YAPPIKA-ActionAid berkomitmen untuk menciptakan cara-cara baru yang adaptif sesuai perkembangan teknologi. Selain itu, organisasi akan terus menyajikan kampanye yang kuat dan kreatif untuk dapat menjangkau segmen publik yang tepat dan lebih luas lagi.



I Putu Agus Sugiarta

IT Manager PT Spirax Sarco Indonesia



Saya masih ingat pada waktu itu saya bertemu dengan perwakilan dari YAPPIKA-ActionAid. Semangat mereka sangat menggugah saya sehingga sekitar 7 tahun lalu saya dengan bangga menjadi bagian dari keluarga YAPPIKA-ActionAid. Mari kita bersama-sama menjadi donor karena donasi yang kita berikan merupakan harapan besar bagi mereka yang sangat membutuhkan. Mari kita buat perubahan menjadi nyata.



Kunjungan I Putu Agus Sugiarto ke Sekolah Dasar dampingi Program Sekolah Aman di Kupang, Nusa Tenggara Timur



PRIORITAS-PRIORITAS ORGANISASI



PEMBIAYAAN, PENGETAHUAN DAN TATA KELOLA

Organizational Priority ketiga ini diukur dari sejumlah indikator yaitu 1) Tata kelola organisasi yang kuat bagi kepemimpinan strategis YAPPIKA; 2) Berkontribusi pada inisiatif regional dan internasional (*dual citizenship*); 3) Sistem dan proses YAPPIKA sejalan dengan federasi AAI; 4) Menguatnya akuntabilitas dan kredibilitas kepada donor dan publik.

◆ Pembiayaan untuk keberlanjutan

Ketergantungan OMS Indonesia terhadap dukungan dana dan pembiayaan dari donor asing sudah kerap dibicarakan. Berbagai penelitian sudah dilakukan, alternatif juga sudah banyak ditemukan. Tetapi, persoalan ketergantungan itu terlihat sulit diselesaikan.

Perubahan konteks pembangunan global, dan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah, membuat aliran dana dari luar negeri cenderung menurun. Kecenderungan itu berangkat dari asumsi perihai kapasitas ekonomi Indonesia yang lebih kuat untuk membiayai pembangunannya sendiri. Mereka menganggap Indonesia tidak lagi membutuhkan bantuan sebesar sebelumnya. Pada saat yang sama, negara donor juga cenderung mengalihkan fokus mereka ke negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Negara-negara ini dianggap memiliki prioritas yang lebih mendesak untuk mendapatkan bantuan. Namun, pergeseran alokasi dana pembangunan juga dipengaruhi oleh prioritas pembangunan Indonesia. Beberapa donor mungkin lebih memprioritaskan isu-isu global seperti perubahan iklim, kesehatan global, atau pembangunan berkelanjutan, yang mungkin tidak menjadi fokus utama pendanaan di Indonesia.

Meskipun faktor penyebabnya tidak tunggal, krisis pembiayaan OMS itu memunculkan pertanyaan. Ketika kapasitas ekonomi Indonesia

meningkat, OMS Indonesia justru menghadapi krisis pembiayaan akibat pergeseran alokasi dana asing dari Indonesia ke negara-negara lain? Apakah OMS Indonesia memang tidak mampu mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi? Apakah efek redistribusi atau *trickle-down effect*, jika ada, samasekali tidak menyentuh organisasi masyarakat sipil?

Selain tantangan di atas, periode 2019-2023 ditandai oleh pandemi COVID-19 yang membawa dampak signifikan di sektor filantropi, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak donor mengurangi atau bahkan menghentikan pemberian bantuan akibat krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Mereka, dan juga sektor privat, mengubah prioritas pembiayaannya dengan memberi alokasi untuk kesehatan dan keselamatan yang secara total meningkatkan biaya operasional. Dana CSR (*corporate social responsibility*) juga cenderung turun. Sebagian besar sumber pembiayaan OMS menyusut selama pandemi itu.

Meskipun menghadapi tantangan, periode 2019-2023 juga membuka peluang baru bagi pembiayaan OMS. Keterlibatan OMS yang masih dalam menanggulangi pandemi, telah meningkatkan eksposurnya di mata masyarakat. Peran OMS terlihat lebih kuat, ketika negara lintang-pukang menanggulangi wabah itu. Pada saat itu, berbagai inisiatif masyarakat sipil muncul menggerakkan solidaritas untuk

kemanusiaan, dan OMS perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola keuangan dan mencari sumber pendanaan baru untuk memastikan keberlanjutannya.

YAPPIKA mengukur pencapaian OP 1 berdasar peningkatan volume dan keberagaman sumber pendanaan dari filantropi, kemitraan, institusional, dan penyediaan layanan untuk memastikan keberlanjutan organisasi. Tahun lalu kami cukup berhasil untuk upaya ini.

Data sharing untuk kanal penggalangan dana *individual giving* di antara 6 organisasi (YAPPIKA, UNHCR, Save the Children, Plan Internasional Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Greenpeace Indonesia) menunjukkan YAPPIKA memiliki kinerja cukup baik. Dengan

reputasi yang kuat sebagai penggalang dana publik, YAPPIKA berhasil mewujudkan kontribusi internasional sebesar Rp 830.586.467 kepada federasi Federasi ActionAid Internasional.

Sampai akhir 2023, didukung oleh 15.124 donatur individual aktif. Jumlah itu adalah 96 persen dari target jumlah donatur individual 2023. Jika dilihat dari total *unrestricted income* yang diperoleh dari donatur individu hingga akhir Desember 2023, kami mampu mencapai 89 persen dari target yaitu Rp 19.965.669.994. Sedangkan dari sumber Perusahaan dan *Foundation* per akhir September 2023, capaian kami baru 19 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.320.525.855.

Pengetahuan dan pembelajaran

Selain dikenal sebagai OMS dengan reputasi yang baik dalam penggalangan dana publik, YAPPIKA memiliki reputasi sebagai organisasi yang belajar (*learning organization*). Bukan hanya belajar untuk kepentingan internal, YAPPIKA ingin ikut memproduksi pengetahuan untuk publik. Tekad itu kami tuangkan dalam Prioritas Organisasi 2 yang ukurannya ada pada kelengkapan, stabilitas dan kompetensi dalam struktur organisasi, manajemen organisasi berbasis kinerja dan meritokrasi, memiliki dorongan untuk berperilaku *sustainable learning*; mengadopsi sistem monitoring federasi; dan, menghasilkan dan menerbitkan pengetahuan organisasi secara rutin.

Pengukuran kinerja staf secara sistematis dan reguler masih menjadi tantangan bagi YAPPIKA. Kami belum mampu merealisasikan instrumen penilaian kinerja antar divisi/unit yang sama, meskipun kami sudah membahas konsepnya sejak kuartal kedua 2023. Sebagian divisi/unit belum melakukan penilaian kinerja secara sistematis. Kami masih perlu meningkatkan kapasitas di bidang HR (*Human Resource*) sebelum memiliki sistem penilaian kinerja yang optimal.

Di sisi yang lain, organisasi ini terus memberi kontribusi dalam berbagai forum pertukaran pengetahuan. Perwakilan YAPPIKA menjadi salah satu peserta aktif dalam kegiatan serial peningkatan kapasitas mengenai “*Freedom of Expression: International Law and the Practice in Myanmar*” yang diselenggarakan oleh *Center for Law and Democracy* (CLD). Perwakilan YAPPIKA juga menjadi peserta aktif dalam kegiatan *Asia Learning Forum* yang diselenggarakan oleh Federasi ActionAid dalam tema *Advancing ActionAids Youth Engagement* serta tema *Peoples Vaccine Alliance*.

YAPPIKA berhasil mengorganisasi *peer data sharing* untuk *individual giving fundraising* di Indonesia yang melibatkan 6 OMS. Kegiatan ini merupakan kali pertama di Indonesia yang diinisiasi mandiri guna mempelajari tren *individual giving* di Indonesia, khususnya untuk OMS yang bukan berbasis keagamaan.

Sepanjang tahun 2023, YAPPIKA cukup produktif dalam menerbitkan pengetahuan organisasi. Setidaknya terdapat 6 laporan/kajian/jurnal/makalah, dan 1 modul/panduan. Berikut adalah produk pengetahuan yang dihasilkan:

a. Laporan/kajian/jurnal/makalah

- Laporan sebagai masukan untuk UNSR FoAA tentang Akuntabilitas Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berkumpul secara Damai dan Berserikat
- Politik Administrasi Kebebasan Berorganisasi bagi Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Akses Sumber Daya dan Pelayanan Publik di Indonesia, Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies, Vo. 3 No. 1 (2022), hlm. 56 – 68, DOI: <https://doi.org/10.33822/jpds.v3i1>
- Paper "Improving Protection and Resilience of Vulnerable and Marginalized Groups During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Inclusive Vaccination", dipresentasikan dalam "The 4th International Conference in Indigenous Religions"
- Paper "Membangun Perlindungan Berbasis Masyarakat yang Dipimpin oleh Perempuan di Tingkat Desa dalam Meningkatkan Resiliensi Komunitas Warga Pasca Bencana: Studi Kasus Program Aksi Kemanusiaan dan Resiliensi di 5 Kabupaten" dipresentasikan dalam Conference AIWEST-DR 2023.

- *Short briefs regarding advocacy opportunities related to the situation in Myanmar*: yang disusun sebagai bahan bacaan awal untuk penyusunan rencana aksi dan kolaborasi untuk kerangka advokasi situasi di Myanmar bersama dengan ActionAid Myanmar, AA Global Secretariat, dan AA Regional Office. Short brief ini memuat informasi terkait dengan advokasi yang sedang berjalan, peluang advokasi di level nasional dan regional, serta rekomendasi bagi kelompok kerja advokasi ActionAid untuk situasi di Myanmar.

- *Short brief regarding ASEAN Civil Society Conference / ASEAN People Forum (ACSC/ APF)*: Short brief ini disusun atas kebutuhan untuk membantu kolega negara anggota ActionAid di wilayah Asia dan Asia Tenggara untuk dapat mengenali ruang advokasi dan kolaborasi yang dimungkinkan bersamaan dengan keketuaan Indonesia untuk ASEAN.

b. Modul/panduan

- Buku Saku Swakelola Tipe IV untuk Kelompok Masyarakat.



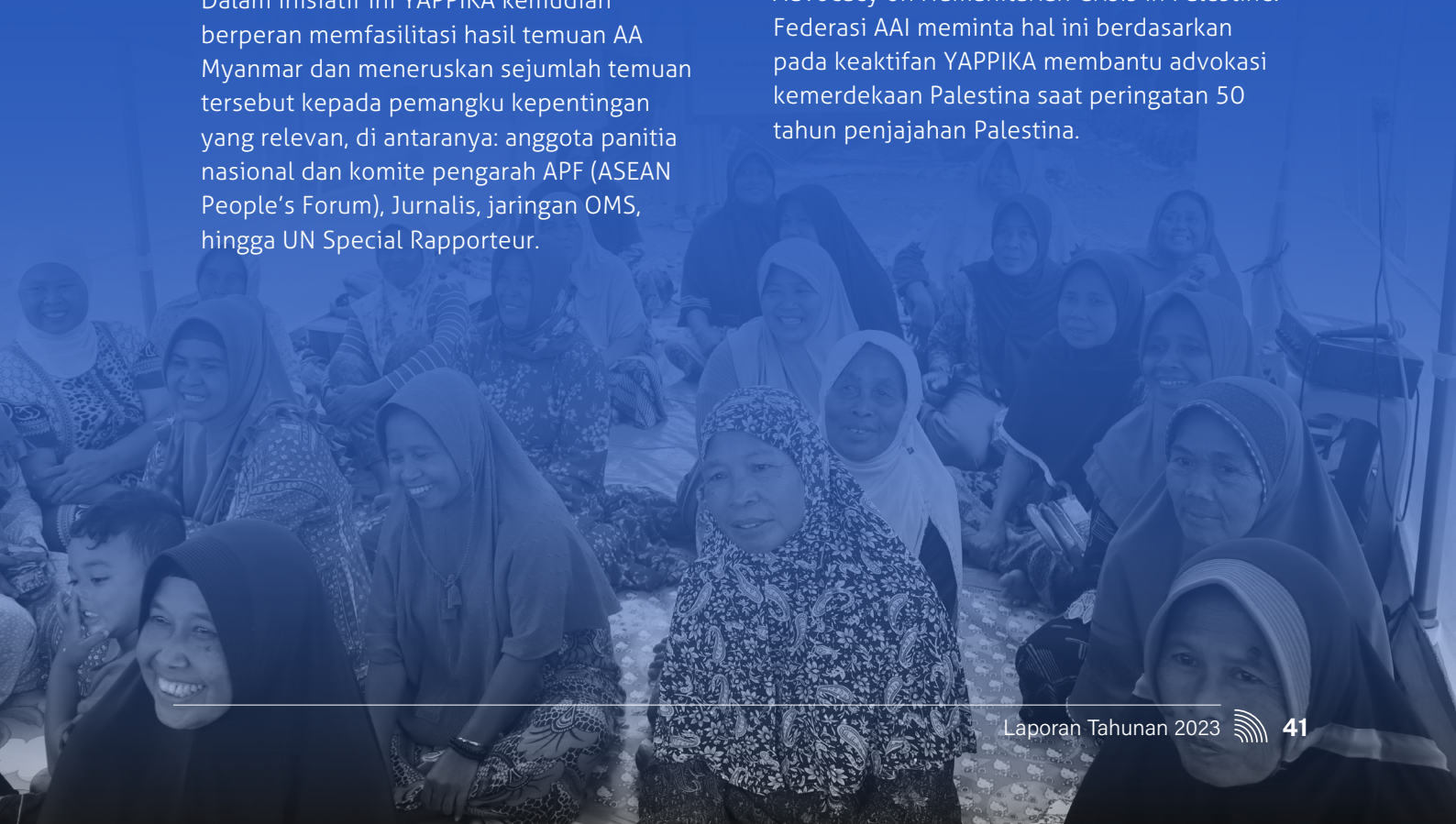


PENGUATAN TATA KELOLA YAPPIKA DALAM TRANSFORMASI MENUJU ANGGOTA AFFILIATE AAI

Bukan hanya soal identitas dan nama organisasi, kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*) bagi OMS Indonesia selalu membawa tantangan lain yang menuntut penyesuaian. Begitu pula yang kami alami. Sejak bergabung dengan Federasi ActionAid International, kami harus menyesuaikan tata kelola organisasi ini, terutama di bidang akuntansi dan administrasi keuangan. Hasil pemeriksaan oleh akuntan publik memberi kami opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selama tahun 2023, organisasi ini mampu meningkatkan kehadirannya pada inisiatif regional dan internasional. Berikut adalah beberapa kontribusi YAPPIKA:

- YAPPIKA terlibat dalam aktif dalam inisiatif regional untuk merespons dan mendorong perdamaian dan keadilan di Myanmar serta menginisiasi kolaborasi advokasi dan aksi bersama dengan ActionAid Myanmar, Kantor Regional dan Sekretariat Global ActionAid. Dalam inisiatif ini YAPPIKA kemudian berperan memfasilitasi hasil temuan AA Myanmar dan meneruskan sejumlah temuan tersebut kepada pemangku kepentingan yang relevan, di antaranya: anggota panitia nasional dan komite pengarah APF (ASEAN People's Forum), Jurnalis, jaringan OMS, hingga UN Special Rapporteur.
- Sebagai lanjutan dari kerja-kerja advokasi sebelumnya, YAPPIKA juga terlibat aktif dalam inisiatif global untuk mendorong keadilan bagi rakyat Palestina. Pada tahun ini YAPPIKA bersama dengan Sekretariat Global ActionAid menyusun paket komunikasi mengenai update situasi di Myanmar untuk menggalang dukungan publik.
- YAPPIKA juga terlibat dalam memformulasikan intervensi ActionAid dalam proses penyusunan *legally binding instrument on business and human rights* bersama dengan kelompok kerja ActionAid untuk isu bisnis dan HAM, bersama dengan sejumlah negara anggota ActionAid lain, di antaranya: AA Global Secretariat, AA Bangladesh, AA UK, AA USA, AA South Africa, dan lainnya.
- YAPPIKA secara khusus diminta oleh Federasi AAI mengusulkan strategi advokasi di tingkat regional dan internasional untuk pembebasan Palestina. Secara khusus YAPPIKA memberikan Short Notes for Advocacy on Humanitarian Crisis in Palestine. Federasi AAI meminta hal ini berdasarkan pada keaktifan YAPPIKA membantu advokasi kemerdekaan Palestina saat peringatan 50 tahun penjajahan Palestina.





YAPPIKA-ActionAid

Kompleks Ruko YAMAHA, Jl. Jend. Basuki Rachmat No.7, RT.6/RW.10
Cipinang Besar Sel., Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410
Telephone: (021) 21018030
E-mail: office@yappika-actionaid.or.id
Website: www.yappika-actionaid.or.id

